

Papua - potret pengelolaan keuangan daerah & pelayanan publik

Pustaka Refleksi - BPK : Opini WTP di Papua Rendah, Akibat Pengelolaan Aset Lemah



Description: Local budget management and public services in Papua Province.

-Papua - potret pengelolaan keuangan daerah & pelayanan publik

-Papua - potret pengelolaan keuangan daerah & pelayanan publik

Notes: Includes bibliographical references (p. 91-95).

This edition was published in 2006



Filesize: 9.98 MB

Tags: #Mendagri #Sebut #Papua #Salah #Susun #RAPBD, #Ini #Kata #Pemprov

Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten Papua 2021

International Journal of Accounting Information Systems, 7 4 , 299—318. The results showed that the local government financial management is in compliance with the legislation and in the implementation of the program is also in accordance with the plan, it means that the financial management has been effective and efficient in accordance with the program and utilize the funds to the maximum. Promoting transparency and accountability through ICTs , social media , and collaborative e-government.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua

Sekretaris Daerah Kepulauan Yapen, Alexander Nussy menjelaskan sistem elektronik diperlukan dalam mewujudakan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif dan akuntabel. Gombo 2018 Analisis Anggaran Kinerja Berperspektif Gender Distrik Wollo Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2016 2017 29 Filomena Turot 2018 Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa Studi Pada Kampung Suskon Dan Kampung Petewi Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom 30 Hendry Pakpahan 2018 Pengaruh Calling Dan Kompetensi Pengurus Barang Terhadap Komitmen Organisasi Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua 31 Imanuel R. JAYAPURA PT — Badan pemeriksa keuangan BPK mencatat porsentase opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Papua baru mencapai 36,67 persen.

Kepulauan Yapen Terapkan SIPD untuk Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut : Tahap proses penyusunan anggaran sesuai dengan UU No. Pembangunan Daerah di Tanah Papua, Tinjauan Pengalaman dan Penerapan Paradigma Pembangunan.

Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DP2KA) Jayapura Sensus Aset Kabupaten

Manajemen Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah. Permasalahan lain dalam perumusan kebijakan dan perencanaan anggaran adalah koordinasi antara pemda dengan pemda lainnya maupun dengan pusat dan stakeholder lainnya di daerah.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua

Permasalahan juga timbul karena ketidakkonsistenan dalam rumusan peraturan perundang-undangan kebijakan, khususnya di bidang perencanaan anggaran yang menjadi fokus penelitian ini. Sebab menurutnya, barang yang menjadi aset daerah tersebut adalah barang bergerak seperti, kendaraan dinas dan juga barang yang tidak bergerak seperti peralatan di kantor.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua

Menurut Simatupang, meski laporan keuangan di 11 kabupaten Provinsi Papua mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK pada 2018 lalu, namun ada beberapa catatan terkait permasalahan laporan keuangan tersebut.

Evaluasi Penerapan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Papua

Mengingat rata-rata sumber pendapatan pemerintah daerah didominasi oleh dana perimbangan yaitu sekitar 80-90%, maka sumber pendapatan pemda dalam kondisi dependable ketergantungan.

Related Books

- [Quartier de la Maison aux mosaïques](#)
- [Gun from nowhere](#)
- [Madeira - impressions and associations](#)
- [Biology of melanomas](#)
- [Pear pest management](#)